

PERSPEKTIF SISTEM PROGRAM PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI MELALUI KARTU TANI OLEH PEMERINTAH DESA CINTAJAYA KECAMATAN LAKBOK KABUPATEN CIAMIS

Rina¹, Eet Saeful Hidayat², Wawan Risnawan³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: rina09729@gmail.com

ABSTRAK

Dalam perspektif sistem, program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani oleh Pemerintah Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis belum optimal. Terlihat dari indikator-indikator permasalahan seperti, jumlah pupuk bersubsidi tidak sesuai dalam pengajuan e-RDKK, lemahnya intensitas kegiatan sosialisasi, dan program belum bisa memberikan dampak perubahan kesejahteraan petani. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif sistem program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani oleh Pemerintah Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Berdasarkan hasil penelitian tentang perspektif sistem program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani belum terlaksana secara optimal. Perspektif sistem menilai efektivitas dari keterpaduan berbagai faktor yang berhubungan, yakni input, process, dan output. Dalam penelitian ini ditemui hambatan seperti kurangnya anggaran pemerintah pusat (Kementerian Pertanian) sehingga terbatasnya pupuk subsidi yang teralokasikan ke daerah-daerah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi. Selain itu program kartu tani belum bisa memberikan dampak kesejahteraan kepada petani, hal ini lantaran akibat terbatasnya pupuk subsidi, akhirnya petani dalam memenuhi sebagian kebutuhan pupuknya menggunakan pupuk nonsubsidi yang harganya jauh lebih tinggi, menyebabkan modal produksi padi menambah yang tidak seimbang dengan hasil pendapatan petani.

Kata Kunci: *Perspektif Sistem, Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Kartu Tani*

PENDAHULUAN

Pertanian menjadi sektor vital pada sebuah negara yang mayoritas mata pencaharian penduduknya sebagai petani. Indonesia menjadi salah satu negara agraris yang memiliki potensi pertanian cukup tinggi. Mengingat luas lahan pertanian Indonesia cukup luas maka perlu dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Pemerintah perlu mendorong kemajuan sektor pertanian agar mampu menciptakan ketahanan pangan yang kuat.

Pembangunan pada sektor pertanian sangatlah penting dan perlu diprioritaskan. Pelayanan publik menjadi unsur esensial dalam mendukung kemajuan pertanian di Indonesia. Pemerintah memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan publik dalam memenuhi kebutuhan dasar publik sebagai warga negara yang telah memenuhi kewajibannya (Sidik, D. S., & Wardani, A. K, 2022). Hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa: “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”

Adapun bentuk pelayanan pemerintah dalam pertanian seperti

memenuhi kebutuhan para petani dalam bertani. Untuk mempermudah dalam bertani maka diperlukan ketersediaan pupuk yang cukup. Oleh karena itu pemerintah perlu ikut andil dalam menyediakan pupuk bersubsidi. Diharapkan pemenuhan pupuk yang cukup dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi tani hingga menciptakan daya jual yang tinggi. Sehingga, petani memiliki pendapatan yang seimbang dengan kebutuhan dasarnya dan mampu berdampak pada kesejahteraan petani.

Dengan demikian pemerintah pusat melalui Kementerian pertanian mengeluarkan kebijakan pupuk bersubsidi melalui program kartu tani. Pada Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dinyatakan bahwa: “Kartu Tani adalah sarana akses layanan Perbankan yang berbentuk fisik atau elektronik/digital yang berfungsi sebagai alat transaksi penebusan pupuk bersubsidi di pengecer resmi.”

Tujuan diterapkannya program kartu tani yakni agar pupuk bersubsidi yang didapatkan petani dapat tersalurkan secara transparan dan tepat sasaran kepada petani yang memang berhak untuk menerimanya. Pupuk bersubsidi yang disalurkan melalui program kartu tani sesuai 6T (enam tepat) yaitu, Tepat Jenis, Jumlah,

Harga, Tempat, Waktu, dan Mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Selain itu kebijakan ini dibuat berangkat dari berbagai penyelewengan pupuk bersubsidi yang biasanya terjadi di kios pengecer, seperti data ganda penerima manfaat, pengurangan pupuk dan sebagainya yang dapat merugikan para petani.

Program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani sudah diterapkan di desa Cintajaya Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis sejak tahun 2017. Namun program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di desa Cintajaya rupanya masih belum sepenuhnya berjalan dengan efektif, masih terdapat beberapa permasalahan yang dirasakan oleh para penerima manfaat program kartu tani yang tentu ini akan menjadi penghambat proses penyaluran pupuk bersubsidi itu sendiri, seperti jumlah pupuk bersubsidi tidak sesuai dalam pengajuan e-RDCK, lemahnya intensitas kegiatan sosialisasi, dan program belum bisa memberikan dampak perubahan kesejahteraan bagi petani.

Menurut Steers (Sutrisno, 2018:96), Perspektif sistem menilai efektivitas dari keterpaduan berbagai faktor yang berhubungan, yakni *input*, *process*, dan *output*. Menurut pendapat dari Kristanto (2003:2), pengertian pendekatan sistem yakni sebagai berikut: “Sistem merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja sama seperti *input*, *process* dan *output*. *Input* yang masuk pada sistem

akan diproses dan diolah sehingga menghasilkan *output*. *Output* tersebut akan dianalisis untuk dilakukan evaluasi dan menjadi bahan pertimbangan untuk *input* selanjutnya.”

Dengan demikian dapat diketahui bahwa sistem dibangun melalui adanya *input*, *process* dan *output*. *Input* apa saja yang diperlukan, seperti apa prosesnya dan hasil apa yang didapatkan. Sehingga memberikan dampak/pengaruh dari hasil yang didapatkan tersebut.

Perspektif sistem untuk melihat berjalan dengan baik atau tidaknya suatu program. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) program dapat didefinisikan sebagai berikut: “Program merupakan suatu rancangan rencana dan usaha-usaha yang akan dilakukan dalam mencapai sebuah tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Sedangkan menurut Arikunto (2018:3), program diartikan sebagai berikut: Program ialah susunan rencana terstruktur untuk direalisasikan dalam rangka mencapai tujuan seseorang atau sekelompok orang.”

Dengan demikian dapat diketahui bahwa program merupakan susunan rencana yang didalamnya terdapat beberapa kegiatan dengan melibatkan sekelompok orang untuk merealisasikan suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Adanya program ialah untuk menghasilkan suatu perubahan atas fenomena

tertentu, menjadikan sesuatu itu menjadi lebih baik.

Program kartu tani sebagai terobosan baru dalam memudahkan petani mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah. Hal ini untuk menunjang keperluan petani dalam bertani.

Sedangkan pengertian kartu tani adalah kartu debit yang dikhususkan bagi petani dengan memiliki fungsi yang sama seperti kartu debit pada umumnya. Kartu tani digunakan untuk transaksi pembelian pada saat melakukan penebusan pupuk bersubsidi di kios pengecer terdekat melalui mesin *Electronic Data Capture* (EDC), Kementan (Halim, 2023:13). Pada saat melakukan penebusan pupuk bersubsidi secara otomatis akan mengurangi kuota pupuk bersubsidi dan saldo pada rekening tabungan petani.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa program kartu tani ialah kartu debit yang diperuntukkan bagi petani sebagai penerima manfaat program untuk mempermudah petani dalam melakukan transaksi penebusan pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan rill petani yang tercantum dalam sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Adanya program kartu tani diharapkan petani menjadi semakin sejahtera dan dapat mempermudah petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk pada tanaman taninya..

Menurut Nazir (2004:537) mengemukakan bahwa: “Subsidi adalah bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tertentu yang tergolong kurang mampu. Bantuan tersebut bisa berupa uang, bahan pangan, dan sebagainya untuk menunjang keperluan masyarakat dalam berusaha.”

Sedangkan pupuk dapat diartikan sebagai unsur penting yang dicampurkan pada tanah untuk menambah nutrisi tanaman sehingga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan dan hasil panen.”

Adapun menurut Kasryno (2015) mengartikan pupuk bersubsidi sebagai berikut: “Pupuk bersubsidi merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah dalam membantu petani kecil untuk meminimalisir biaya *input* petani agar bisa mendapatkan hasil produksi tani yang baik tanpa harus mengeluarkan biaya *input* yang lebih tinggi.”

Dengan demikian dapat diketahui bahwa subsidi merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat kategori tertentu baik itu berupa uang atau suatu produk-produk tertentu untuk mendukung kegiatan usaha atau kegiatan perorangan. Kebijakan pupuk bersubsidi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memfasilitasi bantuan seperti pupuk bersubsidi bagi masyarakat yang memiliki usaha dalam bertani. Hal ini untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Oleh sebab itu, pemerintah melalui kementerian pertanian menyediakan kartu tani

dalam mempermudah petani mendapatkan pupuk sesuai kebutuhannya.

Adapun manfaat yang bisa diberikan kepada petani dari adanya program kartu tani yakni:

- (1) Memberikan kemudahan petani dalam mendapatkan pupuk bersubsidi di kios pengecer sesuai jumlah kebutuhan yang tercantum dalam e-RDCK.; dan
- (2) Pemenuhan pupuk yang sesuai dosisnya akan meningkatkan hasil produksi para petani. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.
- (3) Penebusan dengan sistem e-RDCK akan meminimalisir penyelewengan data penerima manfaat kartu tani. Sehingga program ini dapat meningkatkan tepat sasaran penerima manfaat program.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa program pupuk bersubsidi sebagai upaya pemerintah dalam menjaga tepat sasaran para penerima manfaat pupuk bersubsidi. Agar petani benar-benar menerima pupuk sesuai kebutuhan taninya dan meminimalisir penyelewengan, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan petani.

Kriteria petani penerima manfaat program penyaluran pupuk bersubsidi seperti:

- a. Petani yang tergabung dalam kelompok tani.

- b. Luas lahan paling luas yang dimiliki petani yakni seluas 2 (dua) hektar dan diutamakan bagi petani kecil yang memiliki luas lahan seluas 0,5 hektar.
- c. Petani penerima manfaat program menanam komoditas tertentu yang menjadi fokus program seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu rakyat dan kakao.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa program subsidi pupuk hanya untuk para petani yang telah memenuhi syarat dan ketentuan. Diharapkan dari program pupuk bersubsidi ini memberikan dampak yang signifikan terhadap para petani dalam memenuhi kebutuhannya sehingga menghasilkan produktivitas dan kualitas produk tani dengan hasil yang memuaskan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 8 orang. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu, *data collection* (pengumpulan data), *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *conclusion drawing/verification*.

Adapun fokus penelitian ini untuk meneliti dalam perspektif sistem program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani oleh pemerintah Desa Cintajaya Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Input

Kemampuan pemerintah mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada penerima manfaat kartu tani dengan jumlah yang sesuai dalam pengajuan e-RDCK.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa petani di desa Cintajaya dalam menerima pupuk bersubsidi melalui kartu tani belum bisa memenuhi kebutuhan riil petani. Hal ini terbukti dari kurangnya ketersediaan pupuk bersubsidi yang disalurkan pemerintah membuat pupuk yang dapat disalurkan kepada petani hanya mencapai 50% saja dari kebutuhannya. Adapun faktor penyebabnya karena kurangnya anggaran pemerintah pusat (Kementerian Pertanian) dalam memenuhi kebutuhan pupuk bagi petani.

Mengingat pentingnya ketersediaan pupuk subsidi menjadi *input* untuk meningkatkan produksi pangan melalui program kartu tani. Untuk mendukung hal itu pemerintah idealnya bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Hal ini belum selaras dengan yang dikemukakan oleh Maman, (2021:5) yang menyatakan bahwa:

“Untuk mencapai hasil produksi yang tinggi pada petanian maka tidak terlepas *input* dari kebutuhan para petani seperti pupuk. Dengan itu pemerintah membuat kebijakan pupuk bersubsidi dengan tujuan tiada lain untuk membantu petani dalam meningkatkan hasil produksi tani yang tinggi dan berkualitas.”

Untuk mendukung keberhasilan program penyaluran pupuk bersubsidi dalam mewujudkan hasil produksi pertanian yang optimal. Pemerintah harus benar-benar memastikan pupuk bersubsidi yang disalurkan kepada petani sesuai dengan kebutuhan petani yang diajukan dalam Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDCK). Namun, dilihat dari struk hasil transaksi dan e-RDCK di kios pengecer, petani tidak mendapatkan pupuk subsidi secara sepenuhnya. Contohnya petani yang memiliki luas lahan 0.50 ha membutuhkan pupuk urea 150 kg sedangkan yang teralokasikannya hanya 75 kg atau 50% saja. Jadi, petani di desa Cintajaya dalam menebus pupuk subsidi melalui kartu tani seringkali mendapatkan pupuk subsidi sebesar 50% dari luas lahan yang masing-masing dimiliki petani.

Hal ini belum selaras dengan pendapat yang dikeluarkan oleh Sugiono, (Halim, 2023:14) yang menyatakan bahwa: “Jumlah kebutuhan pupuk yang diajukan petani dalam usulan e-RDCK akan sesuai dengan luas lahan taninya. Maka, pupuk bersubsidi yang akan didapatkan

petani akan sesuai dengan kebutuhannya. e-RDKK disusun oleh kelompok tani dan didampingi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang ada di lokasi masing-masing”.

Dengan demikian kemampuan pemerintah mendistribusikan pupuk bersubsidi dengan jumlah yang sesuai dalam pengajuan e-RDKK belum berjalan dengan semestinya. Kurangnya sumber daya anggaran pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian menyebabkan rendahnya jumlah pupuk yang dialokasikan ke tingkat petani. Alhasil, petani tidak bisa hanya mengandalkan pupuk subsidi saja untuk memenuhi kebutuhan tanaman taninya.

2. Process

Kemampuan pemerintah untuk melakukan kegiatan sosialisasi program kartu tani secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa masih minimnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada tingkat desa yang tidak serutin awal penerapan program. Meskipun demikian, saat menjelang masa tanam masih terdapat sosialisasi yang diadakan di tempat tinggal ketua gapoktan dan dihadiri oleh anggota kelompok tani. Pada kegiatan sosialisasi ini akan diberikan pengarahan oleh lembaga penyuluh yakni BP3K, untuk mengedukasi efisiensi penggunaan pupuk subsidi dan dosis penggunaan pupuk subsidi yang tepat.

Hal ini belum selaras dengan yang dikemukakan oleh Budiani,

(2007:53) yang menyatakan bahwa: “Sosialisasi program yaitu kemampuan pelaksana program menyampaikan segala informasi program kepada masyarakat yang menjadi sasaran.”

Dengan demikian diketahui bahwa kegiatan sosialisasi di tingkat desa sudah jarang dilakukan, tidak seperti awal penerapan program kartu tani. Hal ini terjadi karena melihat kurangnya kesadaran petani dalam mengikuti kegiatan sosialisasi. Namun, pemerintah mengganti kegiatan sosialisasi menjadi di tingkat kelompok saja, meskipun kegiatannya tidak rutin dilaksanakan seperti ketika akan menjelang musim tanam saja.

3. Output

Adanya perubahan kesejahteraan petani setelah menjadi penerima manfaat penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa para petani akan menjual sebagian besar hasil produksi taninya ke tengkulak agar bisa memenuhi kebutuhan dasar baik primer maupun kebutuhan sekunder. Namun, mayoritas petani masih belum mencapai harapan riil. Hal ini dipengaruhi kualitas dan kuantitas hasil produksi padi para petani yang selalu dinamis menyebabkan harga jual yang didapatkan tidak seimbang dengan besaran kebutuhan petani. Sehingga petani dari hasil usaha taninya belum bisa memenuhi setiap kebutuhan dasarnya.

Hal tersebut tidak sejalan dengan pemikiran Poewodarminto, (2015:12)

bahwa: “Kesejahteraan adalah suatu keadaan yang di mana seorang merasa tenang, nyaman, makmur, tanpa ada gangguan dan terhindar dari berbagai permasalahan atau kesukaran dalam hidupnya.”

Untuk mencapai hasil produksi pertanian yang optimal, sangatlah dipengaruhi oleh terpenuhinya asupan pupuk yang diberikan pada tanaman. Namun langkanya ketersediaan pupuk pada program penyaluran pupuk bersubsidi menyebabkan petani desa Cintajaya sebagian besar terpaksa membeli pupuk nonsubsidi yang harganya jauh lebih mahal, hal ini dilakukan untuk memenuhi sebagian kebutuhan tanamannya. Menambahnya besaran biaya pemupukan bisa mengakibatkan tidak imbangnya modal dan pendapatan yang didapatkan petani.

Hal ini tidak selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh Dahiri, (2022:4) yang menyatakan bahwa: “Petani dapat dikatakan sejahtera ketika pendapatannya dapat memenuhi setiap kebutuhan dasarnya. Dalam artian pendapatannya jauh lebih besar daripada pengeluarannya”.

Dengan demikian program ini belum bisa memberikan dampak perubahan kesejahteraan petani setelah menjadi penerima manfaat penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani. Program ini belum mampu merombak hasil produksi padi pada besaran pendapatan petani. Akibat besarnya *input* petani dalam produksi padi seperti kurangnya pupuk subsidi yang

diterima, petani terpaksa menggunakan pupuk nonsubsidi yang memiliki harga lebih tinggi, membuat petani harus menambah biaya modal produksi. Jika pengeluaran dan pendapatan tidak memberikan keuntungan yang cukup, maka petani dalam memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder tidak bisa hanya mengandalkan hasil taninya saja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perspektif sistem program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani oleh Pemerintah Desa Cintajaya Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, masih kurang sesuai dengan variabel yang mempengaruhi keberhasilan dalam perspektif sistem suatu program, hal ini terlihat dari beberapa hambatan yang terjadi seperti: pada indikator *input*, kurangnya sumber daya anggaran pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian menyebabkan rendahnya jumlah pupuk subsidi yang dialokasikan ke tingkat petani. Adapun upaya pemerintah di tingkat Desa bersama BP3K selaku lembaga penyuluh ikut mengawal kegiatan pendistribusian pupuk subsidi sampai ke tingkat petani untuk mengurangi tingkat kelangkaan pupuk. Selain itu, memperkuat edukasi efisiensi penggunaan pupuk dan memanfaatkan pupuk organik ketika pupuk subsidi yang disalurkan tidak mencukupi kebutuhan petani.

Sedangkan pada indikator *process*, masih minimnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada tingkat desa yang tidak serutin awal penerapan program kartu tani. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran petani dalam mengikuti kegiatan sosialisasi. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah desa dan juga BP3K sebagai pihak penyuluh, yakni melakukan kegiatan sosialisasi nonformal yang diadakan di tingkat kelompok walaupun tidak dilaksanakan secara rutin. Namun dengan ini waktunya lebih menyesuaikan petani.

Adapun pada indikator *output*, program kartu tani belum sepenuhnya mampu meningkatkan hasil produksi padi pada besaran pendapatan petani. Kurangnya pupuk subsidi yang diterima, membuat petani terpaksa menggunakan pupuk nonsubsidi yang memiliki harga lebih tinggi, membuat petani harus menambah biaya modal produksi. Jika pengeluaran dan pendapatan tidak memberikan keuntungan yang cukup, maka petani dalam memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder tidak bisa hanya mengandalkan hasil taninya saja. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah desa Cintajaya kemudian bekerjasama dengan BP3K sebagai lembaga penyuluh yakni dengan diadakannya penyuluhan penggunaan dosis pupuk yang tepat, serta pemanfaatan pupuk organik untuk meminimalisir pembelian pupuk disaat pupuk langka. Dengan hal ini, akan membantu petani dalam

mengefisiensikan *input* produksi dan manajemen usaha taninya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Arikunto, Suharsimi. (2018). *Evaluasi program Pendidikan: pedoman teoritis praktis bagi mahasiswa dan praktisi pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas program penanggulangan pengangguran karang taruna “eka taruna bhakti” desa sumerta kelod kecamatan denpasar timur kota denpasar. *Jurnal ekonomi dan Sosial*, 2(1), 49-57.
- Dahiri, D. (2022). Disparitas Dan Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 7(2).
- Halim, Abdul. (2023). *Kartu Tani Dan Pupuk Bersubsidi: Kajian Pemanfaatan Pada Kelompok Tani Di Kabupaten Maros*. Indramayu: Adab.
- Kasryno, F. (2015). Kebijakan Subsidi Pupuk dan Ketahanan Pangan Nasional. Jakarta: Penerbit Pertanian Indonesia.
- Kristanto, Andri. (2003). *Perancangan Sistem Informasi & Aplikasinya*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Maman, U., Aminudin, I., & Novriana, E. (2021). Efektifitas pupuk bersubsidi terhadap peningkatan produktivitas padi sawah. *Jurnal Agribisnis Terpadu*, 14(2), 176-196.

- Nazir, Habib dan Hassanudin, Muhammad. (2004). *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Edisi kesatu. Bandung: Kaki Langit.
- Poerwadarminta, Welfridus Josephus Sabarija. (2015). *Pengertian Kesejahteraan Manusia*. Bandung: Mizan.
- Sidik, D. S., & Wardani, A. K. (2022). Penerapan Teknologi Sebagai Inovasi Pelayanan Di Sektor Publik (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(3), 463-469.
- Sutrisno, Edy. (2018). *Budaya Organisasi*. Jakarta: Prenadamedia Group. Diakses pada hari Senin, 29 Januari 2024. 21.46 WIB.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian